

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN
ANGGARAN DANA DESA**

(Studi Kasus Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI



OLEH :

SIPRIANUS JAHA BAGHE

2018120047

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

FAKULTAS EKONOMI

PRODI MANAJEMEN

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2022

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA

Siprianus Jaha Baghe, Riski Aprilia Dwi Susanti, R. Y. Susanto.

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang 2022

Email : SiprianusJahaBaghe970809@gmail.Com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memutuskan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Anggaran Dana Desa. Jenis pemeriksaan adalah tempat eksplorasi dilakukan. Penjaminan wilayah eksplorasi merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena kepastian wilayah pengujian menyiratkan bahwa hal dan alasan tidak sepenuhnya ditetapkan untuk bekerja sama dengan pencipta dalam memimpin pengujian. Strategi pemilahan informasi ditujukan untuk mencari informasi dan data melalui catatan, baik laporan yang tersusun, foto, gambar, yang dapat menopang siklus kreatif. Strategi pemeriksaan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang paling umum untuk mengatur permintaan informasi, memilahnya menjadi contoh, kelas dan unit dasar penggambaran yang mengenalinya dari pemahaman, khususnya memberikan implikasi yang saling terkait dengan konsekuensi dari pemeriksaan, memahami contoh penggambaran dan mencari hubungan antara unsur-unsur penggambaran, dengan prosedur. Konsekuensi dari peninjauan tersebut, cenderung beralasan bahwa penilaian pelaksanaan moneter dan pengembangan rencana keuangan cadangan kota sangat besar.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan kota, dinyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan kota dilakukan dengan memberikan kekuasaan yang luas, asli, dan dapat diandalkan kepada pemerintah kota secara relatif mulai dari mengatur, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan menilai dalam segala hal. Usaha yang pelaksanaannya dilengkapi dengan standar desentralisasi, dekonsentrasi dan co-organization selain ahli di bidang strategi internasional, perlindungan dan keamanan, hukum, keuangan, moneter, ketat dan ahli yang berbeda yang ditentukan oleh undang-undang tidak resmi.

Dengan kemandirian yang luas, kota memiliki pilihan untuk mengarahkan dan menangani keuangannya sendiri dengan menggunakan dan mengawasi jenis pendapatan dan memutuskan penggunaan yang ditentukan dalam rencana keuangan pembayaran dan konsumsi kota pendem.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, maka kewenangan umum tersebut dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keserasian Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yang membawa akibat terhadap penataan kekayaan keuangan daerah dibandingkan dengan jumlah kegiatan bantuan masyarakat di daerah. Kota ada keseimbangan aset dari otoritas publik Dari menengah ke kabupaten, pendapatan kota menjadi lebih besar sehingga legislatif lingkungan bisa lebih ideal dalam menjalankan roda pemerintahan dan menawarkan jenis bantuan ke daerah.

Misi mendasar dari peraturan nomor 33 tahun 2004 bukan hanya untuk menetapkan kewenangan peningkatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota, tetapi lebih pada kemampuan dan kecukupan aset moneter. Masalah keuangan kota merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kemandirian pemerintah kota, meskipun dianggap bahwa berbagai faktor juga mempengaruhi batas keuangan kota, seperti SDM, asosiasi, eksekutif, kerangka kerja dan faktor pendukung lainnya.

Pentingnya variabel keuangan kota terkait dengan cara penyusunan aset keuangan kota dipandang sebagai bagian paling penting dalam organisasi pemerintah terdekat. Jenis evaluasi presentasi adalah sebagai proporsi moneter. Beberapa proporsi moneter yang dapat digunakan untuk mengukur tanggung jawab pemerintah kota (Halim, 2002: 128), khususnya proporsi kebebasan moneter (kemandirian finansial), proporsi kelangsungan hidup terhadap pendapatan terdekat, proporsi kemampuan moneter kota, proporsi kesesuaian, proporsi pembangunan (investigasi shift), proporsi tingkat pembayaran dan konsumsi kota (pemeriksaan saham).

Pelaksanaan kemerdekaan kota seharusnya tidak terlihat dari bagaimana sebagian besar daerah akan mendapatkan dana cadangan, namun hal ini harus diimbangi dengan sejauh

mana instrumen atau kerangka administrasi keuangan kota yang sedang berjalan dapat memberikan keadilan, kehati-hatian, lugas, partisipatif dan mampu. Seluk-beluk administrasi moneter. .

Mengakui independensi dan desentralisasi yang luas yang memungkinkan otoritas publik untuk mengawasi dana kota yang terletak untuk kepentingan umum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah harus diselesaikan dengan sengaja, sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, produktif, berhasil, lugas dan dapat diandalkan dengan mengutamakan pemerataan dan kesesuaian dengan kemampuan kota untuk mengawasi dana sebagaimana digambarkan. Di ADD langsung dan backhanded. Secara tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah kota untuk mendukung pelaksanaan usaha, perbaikan dan administrasi sosial daerah. Penilaian administrasi moneter wilayah dan pendanaan moneter kota akan sangat menentukan posisi pemerintah kota dalam melaksanakan kemerdekaan kota.

Dengan adanya administrasi moneter daerah yang mandiri untuk bekerja pada produktivitas dan kecukupan penatausahaan aset moneter daerah dalam rangka pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah dan administrasi ke daerah, perkiraan pelaksanaan sangat penting untuk mengevaluasi tanggung jawab legislatif provinsi dalam mengawasi provinsi. Dana. Tanggung jawab bukan sekadar kapasitas untuk menunjukkan bagaimana kas publik dibelanjakan, tetapi juga mencakup kapasitas untuk menunjukkan bahwa kas publik telah dibelanjakan secara mandiri, produktif, dan berhasil.

Rencana pembayaran dan penggunaan keuangan kota pada masa kemerdekaan kota disusun dengan menggunakan pendekatan pameran. Rencana keuangan dengan pendekatan pameran adalah kerangka rencana keuangan yang berfokus pada upaya untuk mencapai hasil pelaksanaan atau hasil dari pengeluaran yang diatur atau distribusi informasi yang belum sepenuhnya diselesaikan.

1. Estimasi pelaksanaan area publik dilakukan untuk tiga tujuan, yaitu:
2. Estimasi area publik direncanakan untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pemerintah kota.
3. Langkah-langkah eksekusi area publik digunakan untuk penunjukan aset.

Langkah-langkah eksekusi area publik direncanakan untuk menunjukkan tanggung jawab publik dan bekerja pada korespondensi institusional.

Berangkat dari landasan di atas, maka penyusun tertarik untuk memimpin kajian dengan judul “Penilaian EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN ANGGARAN DANA DI di Desa Pendem, Junrejo, Kota Batu”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan desa pendem kecamatan junrejo kota batu?
2. Bagaimana pertumbuhan anggaran pendapatan belanja desa pendem kec. junrejo kota batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian penyajian keuangan pemerintah Desa Pendem Kec junrejo kota batu.
2. Untuk merinci pengembangan Desa Pendem menggunakan rencana pengeluaran, kec junrejo, kota batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Pendem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran dalam memutuskan pengaturan dalam penyelenggaraan rencana keuangan pendapatan dan konsumsi ADD.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran analisis rasio terhadap anggaran pendapatan belanja (ADD) serta turut membantu dalam pengembangan dan pengaplikasian ilmu manajemen sektor publik khususnya dalam hal Analisis Anggaran Pendapatan Belanja ADD.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah Desa Pendem

4. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang keuangan desa serta permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya menunjang pembangunan di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Malang. Bayu Media.
- Bastian, Indra Dan Supriyanto. 2003. Sistem Manajemen Sektor Publik: Konsep
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Pemerintah Daerah, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Candra dkk. 2015. Jurnal Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberan (Tahun Anggaran 2010-2014).
- Coryanata, Isma 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Public Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan

- Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (*ADD*). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 2007. *ASPP06*
- Elmi, Bachrul. 2007. *Keuangan Pemerintahan Daerah Otonom Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Fransiska, M., Iriani, N. I., & Budi, C. S. K. (2020). Analisis Rasio Aktivitas Dan Profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada rental motor lestari. (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi).
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Hidayat, Paidi, Pratomo, Wahyu Ario dan Harjito, D. Agus. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatra Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 3, Desember 2007.
- Kaka, P. I., Iriani, N. I., & Budi, C. S. K. (2020). Analisis profitabilitas guna mengevaluasi kinerja keuangan studi kasus UMKM Tohu Srijaya kota Batu (Doctoral, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hal. 189-192.
- Mardiasmo. 2005. *Bungan Rampai: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Noerdiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tentang Standar manajemen Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Prihatminingtyas. B (2019). Pengaruh modal, lama usaha, terhadap pendapatan pedagang di Pasar Landung sari. Referensi Jurnal ilmu manajemen dan Akuntansi Tribhuwana tunggaladewi Vol. 7, No. 2 2019. Hal 147-154. ISSN 2548-6152 (online) ISSN 2089-0532 (cetak). Penerbit *UNITRI PRESS*.
- Plue, G. L., Iriani, N. I., & Nugroho, A. P. (2020). Analisis laporan keuangan untuk mengetahui tingkat Laba pada home industri Kripik Tempe sari rasa Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Tribhuwana Tunggaladewi).
- Permendagri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan *APBD* Tahun Anggaran 2007
- Saiful Huda. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2006-2008. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah Apakah Mengalami Pergeseran. *SNA*, 10, 26- 28 Juli 2007.
- Setyawan, Setu. 2003. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 1, Agustus 2003.
- Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Volume 5, No. 1, April 2006.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah).

Konferensi Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahn Daerah.

Yuwono, S. (2015). Penganggaran sektor publik: pedoman praktis penyusunan pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, *APBD* (berbasis kinerja Malang).

Yuwono, S., I.T. Agus, dan *Hariyandi*. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang